

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azwar, Sarifuddin., 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Buaton, Tiarsen., 2016, *Peradilan Militer di Indonesia di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Kemang, Jakarta.
- Devi Rahayu, Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Marwan., 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Efendi, J & Rijadi, P., 2023, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta.
- Harwanto, Edi Ribut., 2021, *Keadilan Restorative Justice – Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Cetakan I, Laduny Alifatama, Metro.
- H.S., Salim & S.N., Erlies., 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Irianto, S & Shidarta, ed., 2011, *Ragam-ragam Penelitian Hukum, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ishaq., 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karjadi, M., 1979, *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*, Penerbit Politea, Bogor.
- M.M., Peter., 2016, *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- M.M., Peter., 2021, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-15, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi., 2015, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rosidah, Nikmah., 2019, *Hukum Peradilan Militer*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Reksodiputro, Mardjono., 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan III, UI Press, Jakarta.

Soegiri., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, CV. Indra Djaya, Jakarta.

Salam, Moch. Faisal., 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung.

Sianturi, S.R., 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan II, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

Sianturi, S.R., 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, S & Mamudji, S., 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.

Tambunan, ASS., 2005, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 174 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Atasan Berhak Menghukum.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perwira Penyerah Perkara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perwira Penyerah Perkara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

### **C. Jurnal, Tesis dan Disertasi**

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, 3.

- Feriyanti, N., Sinaulan, R.L., & Haris, Moch. (2023). Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Militer. *Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR)*. 4 (2). 14-21.
- Fox, Darrell. (2009). Social Welfare and Restorative Justice, *Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68*, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences. 56.
- Johar, Olivia Anggie. (2021). Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Riau Law Journal*. 5 (2). 126-140.
- Kristianto, Andri. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*. 7(1). 180-193.
- Miftahuddin. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Restoratif Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna*, Vol. 8 No. 1.
- Nur, N.M., Muhadar, & Muin, A.M. (2023). Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer. *Unes Law Review*, 5 (4). 4447-4461.
- Prayitno, Kwat Puji. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Pidana Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3. 409-414.
- Ross, M.R. (2006). A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal. *Journal of the Association of Legal Writing Directors*, Vol. 3. 183.
- Rinaldi, Ferdian. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17. 46
- Sagala, Parluhutan. (2006). Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia. Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 1 No. 1. 18.
- Satria, Hariman. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari*. 3.
- Syahrin, M.A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1 (2). 168-178.
- Syahrin, M.A. (2017). Penerapan Hukum Detensi Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3 (2). 455-481.

Tambir, I Made. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 8 (4). 551.

Tamrin, Zulkifli. (2021). Teori Triangular Concept of Legal Pluralism (Konsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner Menski), *Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.

Wirasaputri, N.M. (2018). Rekonstruksi Penanggulangan Tindak Pidana Disersi Berdasar Sistem Peradilan Pidana Militer Berbasis Restorative Justice. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Zainuddin, M., Mubarak, Z., & Bachriani, R.D. (2022). Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Universitas Karya Husada, Program Studi Ilmu Hukum*.

#### **D. Internet**

Detik Sumut. 2024. Anggota TNI-Warga yang Ditendang di Deli Serdang Berdamai [online]. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7367229/anggota-tni-warga-yang-ditendang-di-deli-serdang-berdamai> [diakses 24 Juni 2024].

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. Tugas dan Wewenang Hakim Peradilan Militer [online]. <http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id> [diakses 2 Januari 2024].

Kompas. 2024. Oknum Prajurit TNI Aniaya Sopir Catering Berakhir Damai dan Korban Minta Maaf [online]. <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/03/172519478/oknum-prajurit-tni-aniaya-sopir-catering-berakhir-damai-dan-korban-minta> [diakses 24 Juni 2024].

Pengadilan Negeri Cianjur. 2024. Terobosan Mahkamah Agung atas Perma Keadilan Restoratif [online]. [https://pn-cianjur.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=543:terobosan-mahkamah-agung-atas-perma-keadilan-restoratif&catid=28&Itemid=101](https://pn-cianjur.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=543:terobosan-mahkamah-agung-atas-perma-keadilan-restoratif&catid=28&Itemid=101), [diakses 21 Agustus 2024].